

BI-TPID Tingkatkan Strategi Jaga Inflasi Jelang HBKN Di Sulut



<http://manado.antaranews.com>

Manado - Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan strategi dalam menjaga inflasiⁱ menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kepala BI Sulut Andry Prasmuko, di Manado, Jumat, mengatakan pihaknya telah memiliki strategi guna menjaga dan mengendalikan inflasi jelang Idul Fitri.

"Salah satunya adalah melakukan *high level meeting* (HLM) secara maraton di seluruh kabupaten dan kota di Sulut," kata Andry, di Manado, Jumat. HLM ini, katanya, diadakan guna mencari solusi dari permasalahan yang ada di masing-masing daerah.

"BI sudah melakukan *high level meeting* di seluruh kabupaten dan kota. Tidak bersamaan tetapi kami melakukan secara maraton untuk memfasilitasi dan membicarakan kondisi terkini, sekaligus mencari solusi terhadap permasalahan yang ada," jelasnya.

Andry mengatakan wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) raya lebih dulu dilakukan HLM. Berikut wilayah Manado dan Kabupaten Kepulauan.

"Isu pertama adalah kondisi di daerah masing-masing seperti apa, karena setiap daerah pasti tidak sama," ujar Andry saat didampingi dua Deputi BI Sulut Fernando Butarbutar dan Marwadi.

Andry mencontohkan, untuk wilayah kepulauan yang kerap mengalami kendala transportasi. Kondisi yang sulit tersebut, menjadi pemicu terjadinya gejolak harga.

Namun, menurutnya, ada dugaan permainan dari pedagang besar.

BI terus mendorong program pemerintah, sebagaimana yang digulirkan Gubernur Olly Dondokambey melalui "Marijo Bakobong" atau mari berkebun.

“Program arahan Pak Gubernur ini sudah direspon kabupaten dan kota, dengan tagline masing-masing sesuai dengan kearifan lokal, untuk melakukan gerakan menanam yang telah berjalan baik,” jelasnya.

Untuk mengendalikan inflasi, BI Sulut, kata Andry telah menyumbang 350 bibit bawang, rica (cabai) dan tomat (barito) yang disebar di kabupaten dan kota.

“Kami juga membantu pupuk yang dapat digunakan cukup untuk tiga bulan. Bahkan BI juga memberikan pendampingan, dengan harapan gaungnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.

Adanya gejolak harga bahan pangan, katanya, yakni beras yang terjadi belakangan ini, katanya, sesuai fakta yang ada, Sulut tidak mengalami kekurangan stok, karena di pasar sejatinya tersedia dalam jumlah cukup.

Agar harga tidak tinggi, katanya, BI mendorong untuk melakukan sidak pasar yang bekerja sama dengan Bulog secara intensif.

"Sebagaimana yang telah dilakukan di Kotamobagu. Strategi ini, harapannya dapat direplikasikan di seluruh kabupaten dan kota," katanya.

Ia mengatakan, untuk mempertajam strategi, semua permasalahan tidak hanya terletak pada ketersediaan stok dan permintaan. Tetapi juga berkaitan dengan psikologis dari penjual dan pembeli, yang juga harus dijaga.

Sumber:

1. *manado.antaranews.com*, BI-TPID tingkatkan strategi jaga inflasi jelang HBKN di Sulut, 10 Maret 2023.
2. *sulut.inews.id*, BI-TPID Tingkatkan Strategi Jaga Inflasi jelang HBKN di Sulut, 10 Maret 2023.

Catatan:

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Nasional yang terdiri dari:

- a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
- c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) s.d ayat (4) Keppres Tim Pengendalian Inflasi Nasional diatur bahwa susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan susunan yaitu: dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi, yang dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi diatur pada Pasal 4 ayat (1) Keppres Tim Pengendalian Inflasi Nasional, yaitu:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Keppres Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Mengenai unsur-unsur dalam Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa paling sedikit meliputi:

- a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
- b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
- d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
- e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

ⁱ Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang (Kamus Besar Bahasa Indonesia).